

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

PEMANTAPAN PROFESIONALISME
PENDIDIK GEOGRAFI DI ERA MEA

DAN

KONGRES PERKUMPULAN PROFESI
PENDIDIK GEOGRAFI INDONESIA (P3GI)

TEMA:

1. Reorientasi Kurikulum Pendidikan Geografi
2. Tantangan Pendidikan Geografi Abad XXI
3. Penguatan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan dan Mitigasi Bencana
4. Urgensi Isu Sosial dan Bonus Demografi

Sabtu, 6 Juni 2015

SAVANA HOTEL AND CONVENTION MALANG



um
The Learning
University

**Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
Universitas Negeri Malang (UM)
Juni 2015**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL 2015

Pemantapan Profesionalisme Pendidik Geografi di Era MEA

ISBN: 978-602-71506-3-8

Editor:

- Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.
- Dr. Ach. Amirudin, M.Pd.

Penyunting:

- Eko Wahyu Setiawan, S.S.

Desain sampul dan tata letak:

- Purwanto, S.Pd., M.Si.
- Ian Hadinata

Penerbit:

Fakutas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Redaksi:

Fakutas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Jl. Semarang No.5 Malang

Telp. (0341) 551213 psw. 376

e-mail: wd1.fis@um.ac.id

website: fis.um.ac.id

Cetakan Pertama, Juni 2015

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun, secara elektronik, maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6).

● TANTANGAN PENDIDIKAN GEOGRAFI DALAM MENUMBUHKAN NASIONALISME NKRI PADA SISWA DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA (STUDI KASUS PENDIDIKAN DI KABUPATEN JAYAWIJAYA DAN PEGUNUNGAN BINTANG)	
<i>Mohammad Haris Muzakki, Nikmatul Istikhomah</i>	197
● PENYUSUNAN INFORMASI GEOMORFOLOGIS DENGAN METODE SURVEI GEOMORFOLOGIKAL ANALITIKAL UNTUK Mendukung PENGELOLAAN KEBENCANAAN DAN LINGKUNGAN DI LERENG BARAT DAYA GUNUNGAPI MERBABU	
<i>Muhsinatun Siasah Masruri, Arif Ashari</i>	207
● ISU SOSIAL DAN BONUS DEMOGRAFI: KONDISI SOSIAL EKONOMI TERHADAP MOBILITAS PENDUDUK USIA PRODUKTIF DARI DESA KE KOTA	
<i>Mustika Arif Jayanti</i>	217
● KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT PROVINSI BANTEN DALAM PENGELOLAAN DAS CIDANAU MELALUI MEKANISME IMBAL JASA LINGKUNGAN	
<i>Nedi Sunaedi</i>	231
● KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM MENGELOLA HIDUP BERSIH DI LUBUAK MANGINDO, JORONG III SANGKIR, KECAMATAN LUBUK BASUNG, KABUPATEN AGAM	
<i>Nefilinda</i>	241
● VISI PENDIDIKAN GEOGRAFI DI ABAD XXI	
<i>Parjito</i>	248
● KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT PUCUNG, EROMOKO, WONOGIRI DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA AIR SUNGAI BAWAH TANAH UNTUK MENGATASI BENCANA KEKERINGAN	
<i>Priyono, Arif Jauhari, Choirul Amin</i>	256
● MEMBANGUN KETRAMPILAN GEOGRAFI GURU MELALUI PENGUASAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFI (SIG) DALAM PEMBELAJARAN GEOGRAFI DI SMAN 1 SUKOSARI BONDOWOSO	
<i>Purwanto, Marhadi S.K.</i>	271
● PENDEKATAN SAINTIFIK (SCIENTIFIC APPROACH) DAN PENILAIAN AUTENTIK (AUTHENTIC ASSESSMENT) DALAM PEMBELAJARAN GEOGRAFI	
<i>Retno Kinteki</i>	277
● KAJIAN SIFAT FISIKA DAN KIMIA TANAH PADA AREAL PERTANIAN BAWANG MERAH DI KECAMATAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO	
<i>Rudi Hartono, Pertiwi, Mentari Dian</i>	284
● DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN	
<i>Shofiatul Mufidah, Ach. Amirudin, Singgih Susilo</i>	291
● PENGURANGAN RISIKO BENCANA HIDROLOGI DENGAN BAMBU SEBAGAI SUMBERDAYA LOKAL DI LERENG VULKAN MERAPI KABUPATEN KLATEN	
<i>Siti Azizah Susilawati, Subarjo, Miftahul Arozaq</i>	298
● PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA)	
<i>Siti Fadjarajani</i>	303
● PENGEMBANGAN BLENDED LEARNING BERBASIS MOODLE UNTUK MATAKULIAH KOSMOGRAFI DI S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI UNIVERSITAS NEGERI MALANG	
<i>Soetjipto</i>	312

PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA)

Siti Fadjarajani

Universitas Siliwangi Tasikmalaya
sfadjarajani2000@yahoo.com

Abstrak: Wilayah Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya merupakan salah satu titik kawasan permukiman kumuh yang berada perkotaan di Kota Tasikmalaya. Kondisi permukiman kumuh di Wilayah Kecamatan Bungursari ini sebenarnya sudah mendapat perhatian pemerintah dengan dilakukannya program penataan P2KP PNPM Mandiri yang juga sudah memberikan arahan penataan kawasan permukiman kumuh. Namun kenyataannya program tersebut kurang memberi hasil yang signifikan untuk perbaikan kawasan, karena kondisi sosial budaya penduduk perkotaan yang semakin berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penataan terhadap kawasan permukiman kumuh di perkotaan, dengan mengambil kasus di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. Analisis penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi secara deskriptif kualitatif mengenai karakteristik permukiman kumuh. Hasil penelitian ini didapatkan berbagai bentuk konsep, rencana, dan strategi penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang sesuai dengan kondisi kawasan serta memperhatikan isu sosial, budaya, dan lingkungan perkotaan yang berkembang di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.

Kata Kunci: Penataan, permukiman kumuh, perkotaan Tasikmalaya.

PENDAHULUAN

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Telaah tentang permukiman kumuh (*slum*), pada umumnya mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut, dan ketiga dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan kota keseluruhannya. Oleh karena itu kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman, sedang kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai.

Permukiman kumuh timbul karena penyebab dan kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik permukiman kumuh harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan rencana penanganannya. Berdasarkan perbedaan karakteristik dan permasalahannya, maka dibutuhkan pendekatan dan penanganan yang berbeda. Ketidaktepatan dalam pemilihan pola penanganan yang mengacu pada tipologi permasalahan kumuh akan mengakibatkan kegagalan dalam penanganannya.

Permasalahan utama adalah bahwa Wilayah Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya merupakan salah satu titik kawasan permukiman kumuh yang berada perkotaan di Kota Tasikmalaya. Kondisi permukiman kumuh di Wilayah Kecamatan Bungursari sebenarnya sudah mendapat perhatian pemerintah dengan dilakukannya program penataan P2KP PNPM Mandiri yang juga sudah memberikan arahan penataan kawasan permukiman kumuh. Namun kenyataannya program tersebut kurang memberi hasil yang

signifikan untuk perbaikan kawasan, karena kondisi sosial budaya penduduk perkotaan yang semakin berkembang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan penataan terhadap kawasan permukiman kumuh di perkotaan, dengan mengambil kasus di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. Analisis penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi secara deskriptif kualitatif mengenai karakteristik permukiman kumuh.

PERMUKIMAN KUMUH

Lingkungan permukiman kumuh didefinisikan sebagai lingkungan permukiman yang berpenghuni padat (melebihi 500 jiwa/ha), kondisi sosial dan ekonomi rendah, jumlah rumah yang sangat padat dan ukurannya di bawah standar, lingkungan dan tata permukiman tidak teratur (bangunan sementara dan acak-acakan tanpa perencanaan), prasarana lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan (MCK, air bersih, saluran buangan, listrik, gang, lingkungan jorok dan menjadi sarang penyakit), fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan), serta dibangun di atas tanah negara atau tanah milik orang lain, dan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan permukiman kumuh tidak bisa dilepaskan dari keberadaan para pendatang (kaum urbanisasi) yang merantau ke kota untuk mendapatkan pekerjaan guna memperoleh penghasilan. Adanya urbanisasi ke kota tiap tahun tidak pernah menurun jumlahnya. Terjadinya arus urbanisasi ke kota disebabkan oleh dua hal yaitu kondisi-kondisi yang mendorong terjadinya urbanisasi dan kondisi-kondisi daya tarik kota. Kondisi-kondisi yang mendorong terjadinya urbanisasi ke kota adalah terjadinya kemiskinan di pelosok pedesaan. Kemiskinan itu dikarenakan tidak tersedianya lapangan kerja yang layak, terdesaknya kegiatan masyarakat desa oleh produksi pabrik berskala besar, terbatasnya lahan persawahan yang bisa digarap sementara jumlah angkatan kerjanya terus meningkat dan membutuhkan saluran. Kondisi-kondisi yang menjadi daya tarik kota adalah di kota merupakan pusat perdagangan, tersedianya berbagai jenis pekerjaan, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

GAMBARAN UMUM WILAYAH

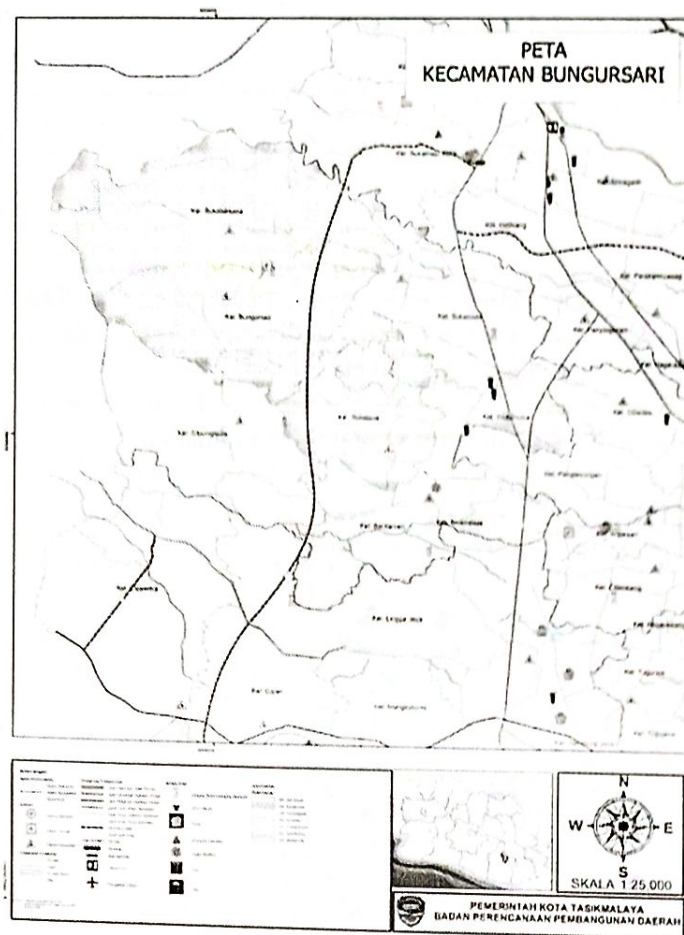
Kondisi Fisis Wilayah

Secara administratif Kecamatan Bungursari merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kota Tasikmalaya dan merupakan pemekaran dari Kecamatan Indihiang. Secara geografis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya memiliki batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
- Sebelah Timur : Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
- Sebelah Barat : Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya

Luas wilayah Kecamatan Bungursari adalah 1436,33 Ha yang terdiri dari 7 Kelurahan, yaitu Kelurahan Sukamulya, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Bantarsari, Kelurahan Sukarindik, Kelurahan Cibunigeulis, Kelurahan Bungursari, Kelurahan Sukalaksana.

Dilihat dari segi geografis Kecamatan Bungursari terletak di sebelah Barat Kota Tasikmalaya dengan jarak dari pusat Kota Tasikmalaya ke pusat Kecamatan Bungursari adalah ± 5 km, dan memiliki ketinggian dari permukaan laut ± 375 meter.



Gambar 1 Peta Kecamatan Bungursari

Kondisi Demografis

Dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Bungursari adalah 47.670 jiwa dan luas wilayahnya adalah 1.436,33 Ha, jadi kepadatan penduduknya adalah 332 jiwa/km²

Sementara itu kepadatan penduduk fisiologis di Kecamatan Bungursari adalah 539 jiwa tiap satu km² pertanian. Kepadatan penduduk fisiologis di Kecamatan Bungursari akan semakin tinggi (padat) seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang pada akhirnya akan mempersempit lahan pertanian. Penduduk di Kecamatan Bungursari dikelompokkan berdasarkan penggolongan usia produktif, yaitu usia belum produktif (0–14 tahun) sebanyak 12031 jiwa; usia produktif (15–64 tahun) sebanyak 32470 jiwa; dan usia tidak produktif (65 tahun ke atas) sebanyak 3169 jiwa.

Tingkat pendidikan di Kecamatan Bungursari berada pada tingkat pendidikan sedang, yaitu dengan persentase penduduk tidak pernah/tidak tamat SD dan hanya tamat SD yaitu sebesar 60% dan masyarakat yang berpendidikan SMP sampai Perguruan Tinggi S2 sebesar 37,1%. Penduduk di Kecamatan Bungursari pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai buruh (19,9%), wiraswasta/pedagang (14,4%) dan beragam mata pencaharian yang lainnya. Masyarakat yang bermata pencaharian petani cukup banyak dari persentase masyarakat. Selain itu masih banyak juga jenis mata pencaharian yang lain. Kondisi ini menggambarkan heterogenitas mata pencaharian yang menjadi ciri khas masyarakat kota.

Potensi Kawasan

1. Merupakan Kawasan Strategis Perkotaan;
2. Merupakan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
3. Merupakan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya;
4. Merupakan Kawasan Lindung Geologi;
5. Merupakan Kawasan Minapolitan;
6. Merupakan Kawasan Pergudangan;
7. Terdapat sumber mata air dari bukit-bukit sekitar;
8. Potensi Perikanan di Kelurahan Cibunigeulis, Sukalaksana, Bungursari, dan Sukarindik;
9. Potensi ekonomi dari kegiatan pertambangan Bahan Galian C.

Permasalahan Kawasan

1. Pertambahan jumlah penduduk tinggi yang dapat mendorong kebutuhan lahan permukiman yang dapat mengakibatkan tingginya konversi lahan pertanian/perkebunan potensial;
2. Pertambangan bahan galian C di bukit-bukit tanpa disertai reklamasi mengakibatkan kerusakan lingkungan;
3. Eksploitasi bukit-bukit sebagai potensi resapan sumber mata air;
4. Pembangunan perumahan tanpa perencanaan yang matang pada lahan-lahan konservasi;
5. Kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa lokasi, yang mendorong tumbuhnya kawasan permukiman, sementara harga lahan perkotaan tinggi, mengakibatkan munculnya permukiman kumuh terutama di kelurahan yang padat penduduk.
6. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan, misalnya sistem drainase/pembuangan limbah yang sangat tidak memadai.

ANALISIS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH



Gambar 2 Lokasi Kecamatan Bungursari

Karakteristik Umum Permukiman Kumuh Kecamatan Bungursari

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

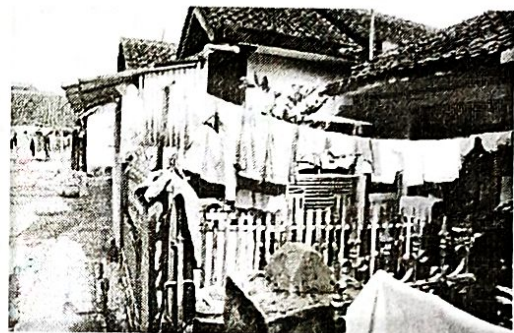
Ciri-ciri utama:

1. Kepadatan penduduk dan tata bangunan sangat tidak teratur dan tidak permanen
2. Jalan lingkungan sempit tidak dapat dilalui roda empat;
3. Fasilitas drainase sangat tidak memadai;
4. Fasilitas pembuangan air kotor sangat minim;
5. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim;
6. Rawan terhadap penularan penyakit akibat kepadatan tinggi dan minimnya sarana prasarana kebersihan;
7. Kepemilikan hak atas lahan seringkali tidak legal dan luasan yang sempit.

Permukiman tidak layak huni, tingkat kepadatan tinggi, dan kualitas bangunan rendah, serta sarana-dan prasarana tidak memenuhi syarat.



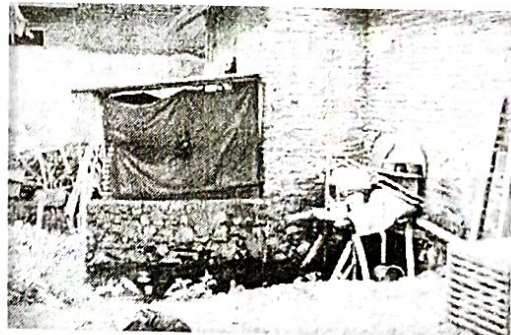
Perumahan tidak layak huni



Perumahan kepadatan tinggi



Kualitas bangunan rendah



Prasarana tidak memenuhi syarat

Gambar 3 Karakteristik Permukiman Kumuh

Kondisi Permukiman secara kualitas

1. bahan bangunan terdiri dari kayu, bambu dan tembok dengan kualitas sangat rendah dan usang;
2. tidak terdapat pembuangan sampah;
3. rumah berdekatan dengan kandang peliharaan warga.
4. atap bangunan rumah berbahan genting tanah liat dengan kualitas rendah dan bertambalan;
5. bangunan rumah memiliki lantai yang rusak bahkan terdapat rumah yang tidak memiliki lantai beralas/lantai langsung berupa tanah;
6. ukuran bangunan rumah relatif kecil rata-rata 3 x 4 m², sehingga fasilitas setiap ruangan untuk beraktivitas keluarga tidak layak.
7. tidak memiliki ruangan kelengkapan rumah dengan jelas yaitu: ruang tamu, dapur, dan ruang tidur berada pada satu ruangan;
8. terdapat banyak rumah yang tidak layak huni.

Kondisi permukiman secara kuantitas/kepadatan

1. Antar rumah penduduk saling berimpitan tanpa batas sehingga terlihat hanya satu rumah padahal terdiri dari banyak rumah warga;
2. Ukuran bangunan rumah yang kecil kurang lebih hanya $3 \times 4 \text{ m}^2$ menyebabkan jumlah rumah warga cukup banyak;
3. Rumah warga pada umumnya tidak memiliki halaman rumah namun langsung berbatasan dengan jalan umum atau selokan dengan jarak 50 cm, sehingga jumlahnya sangat padat dan terlihat kumuh;
4. jumlah rumah kumuh berdekatan dengan jalur parit/selokan.
5. Terdapat beberapa rumah yang berada di atas kolam ikan dengan kondisi air yang kotor dan berbau.

Kondisi sanitasi lingkungan

1. Tidak teraturnya sanitasi lingkungan;
2. sumber air untuk kebutuhan domestik didapat dari sumber mata air yang berdekatan dengan kolam pembuangan sehingga memungkinkan air meresap;
3. Warga tidak memiliki kamar mandi sendiri di setiap rumahnya;
4. Satu kamar mandi di pakai lebih dari 5 KK;
5. Saluran pembuangan kotoran dan air pembuangan dari kamar mandi tidak teratur dan langsung disalurkan ke parit terdekat;
6. Warga memanfaatkan air kolam untuk aktivitas mencuci dan lainnya;
7. Kondisi bangunan kamar mandi yang tidak layak pakai.

Kondisi jalan lingkungan

1. Kondisi jalan lingkungan sangat sempit;
2. atribut jalan tidak lengkap, (tidak adanya lampu penerang jalan, untuk aktivitas kendaraan sangat kurang memadai);
3. kondisi jalan yang tidak beraspal;
4. jalan berlubang dan bergelombang.

Kondisi saluran pembuangan air hujan dan saluran air limbah

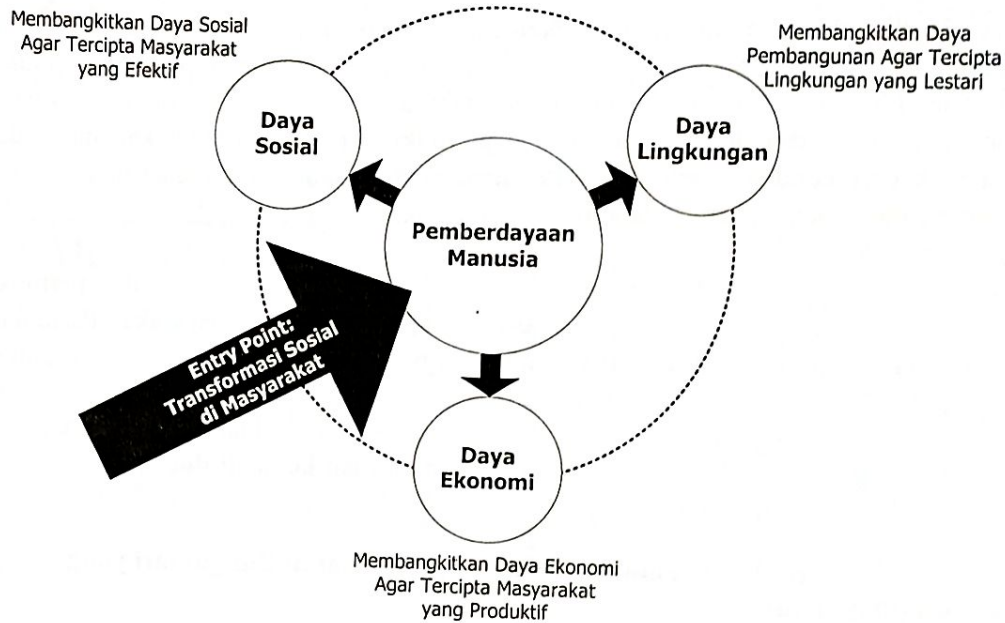
1. kondisi pembuangan air hujan sangat tidak memadai dengan ukuran kurang lebih 50 cm;
2. saluran air limbah rumah tangga warga langsung didistribusikan ke parit atau kolam ikan;
3. selokan/parit saluran air hujan terdapat banyak sampah;
4. sampah menghalangi jalur pembuangan air hujan dan saluran air limbah;
5. air yang mengalir sangat kotor.

KONSEP DAN RENCANA PENATAAN KAWASAN

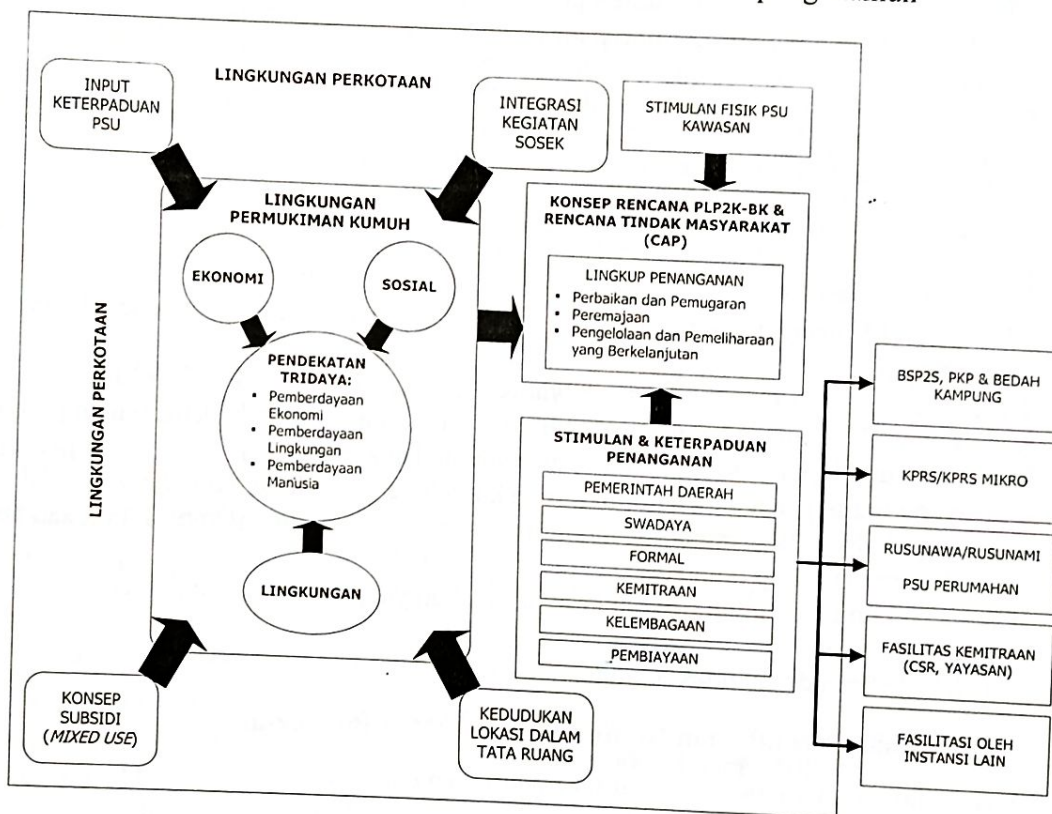
Konsep Tridaya dalam Penataan Kampung Kumuh

Konsep ini diadopsi dari konsep yang diterapkan oleh P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Pada konsep Tridaya merupakan suatu konsep yang sejalan dengan konsep Pembangunan Sosial. P2KP menerapkan pendekatan Tridaya melalui pengokohan kelembagaan masyarakat, sehingga nantinya diharapkan dapat tercipta wadah organisasi yang mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dalam pendekatan Tridaya sosial program diarahkan untuk memberdayakan masyarakat (membangun manusianya), sehingga:

1. Secara sosial akan membangun social sosialisasi di dalam masyarakat untuk mewujudkan komunitas yang efektif.
2. Secara ekonomi mampu mewujudkan komunitas yang produktif.
3. Secara lingkungan, mampu menumbuhkan daya pembangunan di dalam masyarakat untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, produktif dan lestari.



Gambar 4 Konsep Tridaya dalam Penataan Kampung Kumuh



Gambar 5 Prinsip Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi-dimensional dan sosial, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam jangka panjang mampu mengembangkan asset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman mereka maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan.

Lingkup penanganan lingkungan permukiman kumuh mencakup hal-hal berikut di bawah ini.

1. Pemugaran
2. Peremajaan

Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak. Kualitas rumah, perumahan, dan permukiman yang diremajakan harus diwujudkan secara lebih baik dari kondisi sebelumnya. Peremajaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

3. **Permukiman Kembali**
Permukiman dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Permukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. Permukiman kembali wajib dilakukan oleh Pemerintah kota. Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk permukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Rencana penataan kawasan permukiman kumuh Kecamatan Bungursari yang menjadi prioritas harus segera dilakukan:

1. Perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan;
2. Perbaikan dan pembangunan saluran pembuangan air rumah tangga;
3. Perbaikan dan pembangunan saluran air hujan;
4. Penataan tempat pembuangan sampah;
5. Penataan bangunan rumah tidak layak huni.

Model Penataan Permukiman Kumuh

1. Berdasarkan hasil analisis lapangan dengan memperhatikan konsep penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, maka digunakan Model *Land Sharing*.
2. Model *Land Sharing*, yaitu penataan ulang di atas lahan dengan tingkat kepemilikan masyarakat cukup tinggi.
3. Dalam penataan kembali tersebut, masyarakat akan mendapatkan kembali lahannya dengan luasan yang sama sebagaimana yang selama ini dimiliki/dihuni secara sah, dengan memperhitungkan kebutuhan untuk prasarana umum (jalan, saluran, dan sebagainya).

Beberapa prasyarat untuk penanganan permukiman kumuh dengan Model *Land Sharing* adalah:

1. Tingkat pemilikan/penghunian secara sah (mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang ditempati) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas.
2. Tingkat kekumuhan tinggi dengan kesediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar.
3. Tata letak permukiman tidak terpola.

Komponen Penataan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Bungursari

1. **Sistem jaringan air bersih**, yaitu sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan air bagi penduduk suatu lingkungan, yang memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan atau lingkungan, dan terintegrasi dengan jaringan air bersih secara makro dari wilayah regional yang lebih luas.
2. **Sistem jaringan air limbah dan air kotor**, yaitu system jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan air buangan rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran, dan bangunan umum lainnya, yang berasal dari manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan, untuk diolah dan kemudian dibuang dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga aman bagi lingkungan, termasuk di dalamnya buangan industri dan buangan kimia.
3. **Sistem jaringan drainase**, yaitu sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan system jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
4. **Sistem jaringan persampahan**, yaitu sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip penataan tersebut diharapkan pada tahun 2020 Kecamatan Bungursari bebas dari kawasan permukiman kumuh. Berikut ini adalah ilustrasi karakteristik permukiman setelah penataan permukiman kumuh di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya yang diharapkan.



Gambar 6 Ilustrasi Karakteristik Permukiman Kumuh sesudah Penataan

REFERENSI

- Bintarto. R. (1989). *Interaksi Kota Desa dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Branch, Melville C. (1995). *Perencanaan Kota Komprehensif: Penerjemah Ir. Bambang Hari Wibisono MUP MSc*,
- Budiharjo. Eko. (1991). *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Catanese, A. J. (1979). *History and Trends of Urban Planning*. In *Introduction to Urban Planning* edited by Anthony J. Catanese dan James C. Snyder. New York: McGraw Hill.
- Chapin. F.S. (1972). *Urban Land Use Planning*. Urbana: University of Illinios. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ching, DK. (2000). *Arsitektur: Bentuk, Ruang dan Tatanan*. Jakarta: Erlangga.
- Danisworo, M. (1999). *Teori Perancangan Urban*. Bandung: ITB.
- Dunn. William N. (1999). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Etzioni-Halevy. Eva. (1981). *Social Change: The Advent and Maturation of Modern Society*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Lynch. Kevin. (1973). *The Image of the City*. London-England: The MIT Press.